

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah salah satu pemerintahan terkecil disuatu negara, tetapi sebuah desa dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Walaupun demikian kesejahteraan tersebut tidak akan dapat tercapai tanpa didorong oleh sumber daya manusia yang bermutu agar dapat menunjang pembangunan ditingkat lokal mau pun nasional.

Pembangunan nasional dapat dikatakan berhasil jika terjadi peningkatan kemakmuran rakyat, kesehatan dan pendidikan yang tinggi, sehingga memungkinkan mutu kehidupan kenegaraan meningkat, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintah dan koordinasi masyarakat secara efektif dan efisien

Peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi semakin penting, seiring dengan kebijakan desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia. desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada masyarakat, bukan kepada pemerintahan daerah Masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi setempat.

UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).¹ Pada umumnya, yang disebut dengan "pemerintah" adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Oleh karena ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih

¹ CST Kansil et.al., Hukum Administrasi Daerah,(Jakarta.Jala Permata Aksara,2009)

banyak untuk mendorong proses pembangunan nasional. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Terlebih pemerintah desa sekarang ini telah diberi kebebasan dalam mengurus keuangannya sendiri yang berasal dari dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa.

Sehingga desa dapat membangun desanya semaksimal mungkin agar mendorong pertumbuhan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini cenderung seragam mulai berubah bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami oleh daerah bersangkutan.

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Dalam rangka pemerataan pembangunan nasional tersebut, pemerintah baik dari pusat sampai tingkat daerah bersama perangkat birokrasi, berusaha menjalankan konsep kebijakan dalam hal ini kebijakan pembangunan yang merata pada semua kota dan desa, baik secara nasional maupun pada tingkat daerah agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata.²

Dalam undang-undang No. 25 Tahun 2004, "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah."³

penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah"

UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menteri-menteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk

Kebijakan pembangunan daerah yang selama ini hanya merupakan pendukung dari kebijakan nasional, mulai mengalami perubahan sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang di daerah. Perubahan yang terjadi mulai

² Budiman, Arif.2016. Teori Pembangunan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 13

³ UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

dari pemerintah daerah yang diberikan kewenangan lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya, dan pemerintah daerah diberikan dana keuangan dan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri.

Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa.

Seperti yang terjadi di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam waktu periode jabatan kepala desa bapak Kasuma Candra Wijaya.. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan di desa menuju ke arah yang lebih baik, peran dan kinerja pemerintahan desa juga sangat diharapkan untuk dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa, secara khusus dapat memberdayakan masyarakat di Desa Hulu, Kecamatan Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang sehingga bisa berpartisipasi untuk kemajuan dan pengembangan desa.⁴

Dalam era globalisasi dan modernisasi yang semakin berkembang pesat Peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi penting Desa Hulu sebagai salah satu desa yang terletak di pedalaman memiliki potensi yang besar namun masih memerlukan perhatian lebih dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai Peran Pemerintah Desa Hulu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan perlu dikaji lebih lanjut

Peranan pemerintah desa sudah dikatakan baik terutama dalam masalah pembangunan desa dimana pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya agar pembangunan di desa dapat berkembang dan menuju ke arah yang lebih baik melalui berbagai macam cara, seperti melalui musyawarah perencanaan

⁴ Peraturan Desa Hulu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Desa Hulu

pembangunan desa sehingga menghasilkan berbagai program-program pembangunan, melalui komunikasi politik dengan pemerintah daerah untuk suatu kegiatan pembangunan. Tetapi tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada di Desa Hulu.

Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap program pembangun yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan pembangun di desa hulu dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. maka akan mengalami hambatan bahkan tidak akan dapat terwujud atau dikatakan tidak berhasil Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sebagai penulis akan mengkaji bagaimana peranan pemerintah desa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Hulu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tembok penahan tanah di Desa Hulu,, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang , ?
2. Apa saja hambatan / kendala pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tembok penahan tanah di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, ?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang Peran Pemerintahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan sehingga dapat memberikan kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan tembok penahan tanah di Desa hulu.
2. Untuk mengetahui hambatan / kendala pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tembok penahan tanah di Desa Hulu, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam melakukan setiap penelitian pasti ada manfaat dari sebuah penelitian yang di lakukan untuk menambah wawasan penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memperkaya ilmu peneliti tentang peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.
2. Menjadi masukan secara langsung bagi perpustakaan jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Islam Sumatra utara dan sekaligus bisa menjadi pengembangan peneliti-peneliti lainnya khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Menjadi masukan bagi pemerintah desa Hulu sebagaimana pentingnya peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tembok penahan tanah desa.
4. Sebagai landasan untuk membaca peranan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Teori Penelitian

2.1.1 Peranan Pemerintah Kecamatan

a. Pengertian Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa (torang 2013).⁵

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

⁵<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/1345/1039/#:~:text=Peran%20menurut%20terminologi%20adalah%20seperangkat,task%20or%20duty%20in%20undertaking%E2%80%9D.>

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto(2006), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁶

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

b. Jenis-jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a) Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b) Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c) Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d) Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.

⁶ Soerjon, Soekanto dan Budi Sulistywati. 2006.Sosiologi suatu pengantar .Jakarta:Rajawali pers.

- e) Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f) Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- g) Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

c. Struktur Peran

Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :

1. Peran Formal

Peran formal merupakan peran yang memiliki sifat homogen dimana berarti dapat terlihat jelas dan nyata.

2. Peran Informal

Peran informal merupakan suatu tindakan yang bersifat implisit yang berarti tidak terlalu terlihat dan tertutup.

Peran informal dilaksanakan guna menjaga stabilitas dan memenuhi kebutuhan emosional sehingga dalam pelaksanaannya yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

2.1.2 Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah adalah entitas dengan kedaulatan untuk menciptakan dan menegakkan hukum dan peraturan di area tertentu. Di sisi lain, pemerintahan mencakup semua kegiatan yang diselenggarakan oleh negara dalam rangka memajukan kemakmuran warga negaranya dan kebutuhan negara, sehingga tidak terbatas pada fungsi eksekutif, tetapi juga mencakup tanggung jawab lain seperti legislatif serta yudikatif.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam mensejahterakan masyarakat, di antaranya: Memberikan pelayanan publik, Mengembangkan wilayah secara berkelanjutan, Memfasilitasi masyarakat, Memberikan arahan kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan.

Pemerintah Desa menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

UU Desa sudah ditetapkan dan diundangkan 25 April 2024 dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yang mendasari ditetapkannya UU Nomor 3 Tahun 2014 ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
3. Bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan

⁷ Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
<https://akah.desa.id/artikel/2019/9/9/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa>

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Sedangkan Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas- tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo Desa ialah suatu kesatuan kaidah yang sejumlah penduduknya menetap diarea tersebut yang berkuasa menjalankan pemerintahan sendiri. Menurut konsep tersebut, desa merupakan kawasan dengan kepadatan rendah yang terdiri dari banyak kampung, dusun, banjar, dan jorong yang semuanya termasuk unsur dari kecamatan serta dikepalai oleh kepala desa.

b. Pengertian desa

Menurut Landis pengertian “Desa dapat diuraikan dalam 3 aspek, yaitu: (1) aspek analisis statistik yang mendefinisikan desa sebagai suatu zona berpenduduk < 2500 jiwa, (2) aspek kajian sosial psikologis yang mendefinisikan desa sebagai tempat yang antar warganya bersifat informal dan mempunyai ikatan akrab, dan (3) aspek kajian ekonomi yang mendefinisikan desa sebagai lingkungan yang penduduknya bergantung pada pertanian.”

Berdasarkan definisi para pakar tentang desa yang telah dipaparkan, maka bisa dikonklusikan bahwa desa yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang dibentuk oleh pemerintah yang memegang kewenangan untuk mengurus wilayahnya sendiri.

Sedangkan pedesaan ialah area yang aktivitas agraria dan manajemen sumber daya alamnya menjadi kegiatan utama penduduk, dengan penataan fungsi wilayah seperti area pedesaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, serta aktivitas ekonomi.

Menurut Rifhi Siddiq Desa ialah suatu area yang memiliki tingkat kepadatan sedikit yang ditempati oleh warga dengan koneksi kemasyarakatan

yang berperilaku seragam, rata-rata bekerja di bidang agraria serta cakap berhubungan dengan daerah sekitarnya yang lain.

2.1.3 Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi.

“Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut” (Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008).⁸

Menurut Salusu: “Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, “participation” adalah hal mengambil bagian.

⁸ Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008

https://ejournal.up45.ac.id/index.php/Jurnal_Enersia_Publika/article/download/1395/810

Menurut Juliantara substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah :

Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan.

Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan- persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control (adi, 2001).⁹

Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :

1. Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. Access, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. Control, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

⁹ Adi, Isbandi Rukminto.2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat. Dan intervensi Komunitas. Jakarta

Participation adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan. Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Masyarakat dalam kedudukannya sebagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesediaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai. Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagian¹⁰ bahwa penggerakan adalah merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien serta ekonomis.

Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat kita lihat pada penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak sekali ditentukan oleh :

1. Kebutuhannya,
2. Interst masyarakat,
3. Adat istiadat dan sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain.

b. Derajat Kesukarelaan Partisipasi

Dusseldorp dalam mardikanto dan poerwoko membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut :

- 1) Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri.

¹⁰ Siagian. Sondang P. 2004. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta: Rineka cipta

- 2) Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari luar meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
- 3) Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya atau peran serta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperan serta khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakat.
- 4) Partisipasi tertekan oleh alasan sosial-ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- 5) Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

c. Pengertian Masyarakat

“Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut” Horton dan Hunt, (1989).¹¹

Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat mendefinisikan “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas”.

Sedangkan menurut Mayo masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep yaitu :

¹¹ ” Horton dan Hunt, (1989).Sosiologi. Jakarta:Erlangga. Modul Sosiologi.

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.
2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama” yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti pada halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Adapun Abdulsyani dalam Devirahman menyebutkan beberapa definisi mengenai masyarakat (Society) dari beberapa tokoh sebagai berikut:

1. Mac Iver dan Page, mengatakan bahwa, “masyarakat adalah suatu system kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan social. Dan masyarakat selalu berubah”.
2. Ralph Linton mengatakan bahwa, “masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai sesuatu kekuatan social dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”.
3. Selo Soemardjan, menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.
4. Dalam buku Sosiologi kelompok dan Masalah Sosial dijelaskan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas- realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri.

5. Hassan Shadily mendefinisikan masyarakat sebagai suatu golongan besar kecil dari beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.
6. J.I. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama.
7. M.J. Herskovits mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.

Masyarakat yang ideal adalah yang meski mereka memiliki sub jati diri yang berbeda-beda tetapi mereka menyatu dalam satu identitas masyarakat, mematuhi peraturan yang disepakati bersama dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sosok tokoh masyarakat berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat. Dengan kata lain dapat di katakan bahwa maju mundurnya suatu masyarakat salah satunya di pengaruhi oleh keterlibatan atau partisipasi tokoh masyarakat pada setiap aktivitas kegiatan pembangunan.

d. Ciri-Ciri Masyarakat

Ciri-ciri dari sebuah masyarakat adalah :

- Sekumpulan manusia yang hidup secara bersama, minimal terdiri dari dua orang.
- Saling membaur dan bergaul dalam waktu yang lama.
- Berkumpulnya manusia tersebut akan menghasilkan manusia baru.
- Terdapat sistem peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- Terdapat sistem komunikasi didalamnya.
- Masing-masingnya menyadari bahwa mereka adalah satu kesatuan
- Sistem kebersamaan yang ada menimbulkan kebudayaan.

e. Fungsi Masyarakat

Keberadaan masyarakat secara umum menjadi kekuatan bagi sebuah desa. Oleh karena itu, fungsi-fungsi masyarakat antara lain sebagai berikut :

- Fungsi Pemeliharaan

Fungsi ini memiliki arti bahwa masyarakat memiliki peran dalam mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi milik masyarakat itu sendiri serta masyarakat selalu menyiapkan dasar-dasar untuk bertingkah laku menuju kenyataan yang lebih tinggi.

- Fungsi Mencapai Tujuan

Dalam mencapai tujuan, tentunya diperlukan penyusunan suatu skala prioritas. Oleh karena itu, masyarakat berperan didalamnya dan turut ikut serta dalam menciptakan sistem sosial. Fungsi ini pun mengatur hubungan antara masyarakat dan substansi kepribadian.

- Fungsi Interaksi

Fungsi interaksi berarti masyarakat merupakan koordinasi yang dibutuhkan oleh unit-unit menjadi bagian dari sebuah sistem sosial. Sistem sosial tersebut pun memiliki keterkaitan dengan unit yang berkontribusi terhadap organisasi dan fungsi-fungsinya secara keseluruhan.

f. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003:78)³² adalah “proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

3. Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep man-centered development yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.¹²

Menurut Watson Soetomo faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah :

1. Faktor internal

Menurut Slamet faktor-faktor internal adalah berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya.

Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan atau penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi seperti usia, tingkat pendidikan jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti, faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

e. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat

Menurut Carter (dalam Santoso, 2005:2), menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah :

1. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
2. Partisipasi masyarakat sebagai strategi

¹² Marzuku, Muhammad. 2004. Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipasi. Modul PKM, Jakarta. Dapertemen dalam Negara.

3. Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi
4. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
5. Partisipasi masyarakat sebagai terapi.

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :

1. Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
2. Meningkatkan proses belajar
3. Meneliminir perasaan terasing
4. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
5. Menciptakan kesadaran politik
6. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
7. Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen system Demokrasi

f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada.¹⁴

Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan

¹⁴ Ndarah, Taliziduhu. 2007. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penerbit yayasan karya

masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan dan menilai hasil partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi viskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan.¹⁶

a. Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli

Lukmanul Hakim, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar

¹⁶ Widjaya. 2003 Pemerintah desa/masyarakat. Jakarta. PTraja gerapindo.

Sari P yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harus efektif dan berhasil, dan tidak dapat mengatur kepentingan pribadi beberapa kelompok karena dengan lebih. Agar secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kebijakan yang akan diambil harus dilibatkan, motivasi penting di balik kontribusi desa adalah untuk masukan dan saran yangl bermanfaat bagi penduduk dan jaringan yang tertarik (kepentingan umum) agar pengambilan keputusan berkualitas, karena dengan mempengaruhi individu yang mungkin terpengaruh oleh pendekatan dan kebijakan pihak yang berkepentingan, pilihan dinamis dibuat.

Persyaratan dan asumsi untuk jaringan dan pertemuan ini dapat ditangkap dan kemudian digabungkan menjadi sebuah ide. Pada sisi lain, opini dan tanggapan masyarakat akan membantu pengambilan pilihan (mitra) untuk mengidentifikasi prioritas dan kepentingan, dan peran masyarakat juga merupakan etikal politik yangl memandang masyarakat sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan.

Meronda M (2021:146)⁴³ mengatakan bahwa ada empat bentuk indikator yang mencakup teori inti partisipasi masyarakat dalam perannya, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di wilayahnya perlu ditumbuhkan melalui forum yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan terhadap program yang telah disepakati bersama di wilayah setempat.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan program yang dibuat

Diartikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan atau program yang dibuat, merupakan sebuah lanjutan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui

keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan program yang dibuat.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Bentuk partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangat diperlukan, guna mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan.

4. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program yang dilaksanakan secara langsung, sehingga hasil dari program yang dibuat menjadi sia-sia. Dengan demikian, perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil, misalnya: memanfaatkan hasil dari sebuah program yang dibuat dengan maksimal.

b. Tembok Penahan Tanah (TPT)

a) Pengertian Tembok Penahan Tanah (TPT)

Tembok penahan tanah adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk menahan tanah lepas atau alami dan mencegah keruntuhan tanah yang miring atau lereng yang kemantapannya tidak dapat dijamin oleh lereng tanah itu sendiri. Tanah yang tertahan memberikan dorongan secara aktif pada struktur dinding sehingga struktur cenderung akan terguling atau akan tergeser (Tanjung, 2016).

b) Fungsi-Fungsi Tembok Penahan Tanah (TPT)

Tembok penahan tanah berfungsi untuk :

1. Tembok Penahan Tanah (TPT) berfungsi untuk menahan tanah yang tidak stabil atau memiliki kemiringan yang curam.
2. Tembok Penahan Tanah (TPT) berfungsi mencegah tanah dilereng atau tebing untuk bergeser atau longsor ke sisi lain.
3. Tembok Penahan Tanah (TPT) berfungsi untuk mencegah erosi tanah akibat tekanan air atau angin.

4. Tembok Penahan Tanah (TPT) digunakan untuk membentuk lahan datar atau bertingkat di area dengan perbedaan ketinggian yang signifikan.
5. Tembok Penahan Tanah (TPT) berfungsi meningkatkan keamanan area di sekitar bangunan atau infrastruktur yang berbatasan dengan lereng atau tebing.

c) Tipe-Tipe Dinding Tembok Penahan Tanah (TPT)

Ada beberapa tipe dinding tembok penahan tanah, diantaranya:

- Dinding gabion: Dinding ini terdiri dari kotak-kotak terbuat dari besi atau logam yang diisi dengan batuan atau pasir. Dinding gabion digunakan untuk menahan tanah di lereng atau di daerah yang rawan longsor.
- Dinding terasering: Dinding ini terdiri dari beberapa lapisan tanah yang dikumpulkan dan dibentuk seperti teras-teras. Dinding terasering digunakan untuk menahan tanah di lereng atau di daerah yang rawan longsor.
- Dinding tanah berpilin: Dinding ini terdiri dari beberapa tiang yang dalamkan ke dalam tanah dan dihubungkan dengan kawat atau tali.
- Dinding tanah berpilin digunakan untuk menahan tanah di lereng atau di daerah yang rawan longsor.
- Dinding tanah tetap (sheet pile wall): Dinding ini terdiri dari plat-plat besi atau kayu yang dalamkan ke dalam tanah. Dinding tanah tetap digunakan untuk menahan tanah di daerah yang rawan longsor atau sebagai dinding pembatas untuk proyek-proyek konstruksi.
- Dinding berlubang : Dinding ini terdiri dari sebuah dinding yang memiliki lubang-lubang dan digunakan untuk menahan tanah yang bergerak. Dinding berlubang digunakan untuk menahan tanah di lereng atau di daerah yang rawan longsor.
- Dinding Penahan Tanah Segmental : Dinding penahan tanah ini terdiri dari susunan beton modular yang saling mengunci satu sama lain dan

biasanya untuk timbunan diperkuat dengan material geogrid atau geostrap.¹⁷

2.1.4 Pembangunan Desa

a. Pengertian Pembangunan

Sondang (dalam Pranoto, 2011), mengemukakan arti pembangunan adalah

- a) Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b) Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah (2005), mendefinisikan pembangunan bisa saja diartikan sebagai berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, Negara satu dengan Negara lain.

Pembangunan, yang merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana dilakukan secara sadar suatu Bangsa, Negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

b. Pengertian Pembangunan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

¹⁷ <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/construct/article/download/2590/1173/9271>

pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

c. Konsep Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Perencanaan merupakan keputusan untuk waktu yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan? Bilamana akan dilakukan? Dan siapa yang akan melakukan? Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan ditentukan sebelumnya.

Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien yang dapat memberikan hasil optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pada dasarnya perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu: tujuan akhir yang ingin dicapai, sasaran-sasaran dan prioritas untuk merealisasikan tujuan akhir, jangka waktu yang diperlukan dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk merealisasikannya, orang/organisasi atau badan pelaksanaannya.

Di daerah pedesaan dan kelurahan dalam pembuatan dan pelaksanaan sebuah program kerja dalam bidang pembangunan, maka dalam hal pembuatan

perencanaan pembangunan desa dan kelurahan akan diserahkan pada sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang memiliki statement dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakannya, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

d. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan

Berbicara tentang pembangunan desa, selama ini sebagian diantara kita terlalu terpaku pada pembangunan berskala besar (atau proyek pembangunan) di wilayah pedesaan. Padahal pembangunan desa yang sesungguhnya tidaklah terbatas pada pembangunan berskala “proyek” saja, akan tetapi pembangunan dalam lingkup atau cakupan yang lebih luas. Pembangunan yang berlangsung di desa dapat saja berupa berbagai proses pembangunan yang dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan sebagian atau seluruh sumber daya (biaya, material, sumber daya manusia) bersumber dari pemerintah (pusat atau daerah), selain itu dapat pula berupa sebagian atau seluruh sumber daya pembangunan bersumber dari desa.

Sesungguhnya, ada atau tidak ada bantuan pemerintah terhadap desa, denyut nadi kehidupan dan proses pembangunan di desa tetap berjalan. Masyarakat desa memiliki kemandirian yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi diri dan keluarganya serta membangun sarana dan prasarana di desa. Namun demikian, tanpa perhatian dan bantuan serta stimulan dari pihak-pihak luar desa dan pemerintah proses pembangunan di desa berjalan dalam kecepatan yang relatif rendah. Kondisi ini yang menyebabkan pembangunan di desa terkesan lamban dan cenderung terbelakang.

Jika melihat fenomena pembangunan masyarakat desa pada masa lalu, terutama di era orde baru, pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan negara secara sentralistik. Dimana

pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan dukungan negara-negara maju dan organisasi-organisasi internasional. Pembangunan desa pada era orde baru dikenal dengan sebutan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), dan Pembangunan Desa (Bangdes). Kemudian di era reformasi peristilahan terkait pembangunan desa lebih menonjol “Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)”. Dibalik semua itu, persoalan peristilahan tidaklah penting, yang terpenting adalah substansinya terkait pembangunan desa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama peneliti, tahun penelitian dan judul penelitian	Metedologi penelitian	Hasil
1)	Azhar Azhar, Irfan Setiawan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas	Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi.	Cukup Baik". Kepala Desa dinilai memiliki kecerdasan, kedewasaan emosional, motivasi tinggi, dorongan berprestasi, dan sikap hubungan kemanusiaan yang baik.
2)	Peran Kepemimpinan Perangkat Pemerintah Desa Dalam Partisipasi	Pengumpulan data menggunakan data primer dihasilkan dari	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum optimal

	Masyarakat Pada Pembangunan	pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.	
3)	Sri Susanti (2015)	Metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek penelitian	Bahwa peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sukamaju yang dilihat dari aspek animasi sosial yaitu motivasi dalam bentuk penghargaan tidak pernah diberikan kepada petani yang hasil pertaniannya meningkat.
4)	Wafiq Laelatul Kodrianingsih, Rispawati Rispawati, Bagdawansyah Alqadri (2023) Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partispasi masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Aikmel	Penelitian Kualitatif	Memberikan sosialisasi untuk memberikan motivasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Meningkatkan pendekatan dan pembinaan sehingga masyarakat dengan sukarela mau menyumbangkan tenaga, alat ataupun dana.

2.3 Kerangka Pikir

Adapun teori yang menjadi kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia., Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

- 2) Tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa⁴⁹
- 3) Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁹Undang-Undang Tentang Desa Pasal 78 (1).



Gambar 1 Kerangka Berpikir